



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## REAKTIVASI STATUS INTERNASIONAL PADA TIGA BANDARA

**Fitria Melinda**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[fitria.melinda@dpr.go.id](mailto:fitria.melinda@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah resmi mengembalikan status internasional tiga bandara di Indonesia melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KM 26 Tahun 2025 pada tanggal 25 April 2025. Ketiga bandara tersebut adalah (a) Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, (b) Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan (c) Bandara HAS Hanandjoeddin Belitung. Penghapusan status internasional ketiga bandara tersebut, sebelumnya dilakukan bersama-sama dengan 14 bandara lainnya, melalui Kepmenhub No. 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional. Kebijakan penataan bandara internasional ini berdampak terhadap pengurangan kuantitas bandara internasional dari 34 bandara menjadi 17 bandara.

Dengan pengembalian status internasional ketiga bandara, kuantitas bandara internasional di Indonesia kini bertambah menjadi 20. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk memperkuat konektivitas global pascapandemi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan industri pariwisata daerah.

Penetapan sebuah bandara menjadi bandara internasional didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional. Status internasional diberikan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, *pertama*, bandara harus sesuai dengan rencana induk nasional. *Kedua*, faktor pertahanan dan keamanan negara menjadi pertimbangan penting yang disesuaikan dengan arah kebijakan nasional. *Ketiga*, potensi pariwisata di sekitar bandara turut diperhitungkan, termasuk dukungan infrastruktur dan moda transportasi darat. *Keempat*, kemampuan dan kebutuhan angkutan udara nasional, baik untuk penumpang maupun kargo. Bandara juga harus berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri, yang tercermin dari tingginya pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusi sektor transportasi udara terhadap produk domestik regional bruto.

Kembalinya status internasional pada tiga bandara ini menjadi peluang besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mempersiapkan berbagai kegiatan berskala internasional sebagai upaya menarik kedatangan wisatawan mancanegara. Bandara ini berkapasitas lebih dari 6 juta penumpang per tahun dan telah meraih penghargaan Airport Service Quality (ASQ) Awards 2024 serta masuk dalam *Roll of Excellence* dari Airport Council International. Sementara itu, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang diharapkan mampu mendongkrak aktivitas ekspor-impor Sumatera Selatan. Bandara ini memiliki kapasitas 3,4 juta penumpang per tahun dan meraih tiga penghargaan ASQ Awards 2024 atas kualitas layanan dan pengalaman penumpang. Adapun Bandara HAS Hanandjoeddin Belitung diharapkan menjadi gerbang masuk wisatawan asing ke kawasan pesisir dan bahari, serta telah menerima sejumlah apresiasi dari Kementerian Kesehatan dan Otoritas Bandara atas pengelolaan bandara yang baik.

PT Angkasa Pura Indonesia sebagai operator telah menyatakan kesiapan dalam memenuhi persyaratan layanan internasional, termasuk penyediaan personel imigrasi, bea cukai, dan

karantina. Meskipun infrastruktur untuk ketiga layanan tersebut telah tersedia, proses operasional dan perizinan, seperti *flight approval*, masih dalam tahap pembahasan intensif antara PT Angkasa Pura Indonesia dan maskapai. Maskapai AirAsia, Scoot, dan Malindo Air direncanakan akan membuka layanan rute internasional dari ketiga bandara ini, dengan tujuan awal Singapura dan Malaysia. Namun, kesiapan tidak hanya terbatas pada aspek teknis, melainkan juga mencakup perencanaan rute serta strategi promosi destinasi. Selain itu, status internasional membawa konsekuensi tambahan berupa biaya operasional yang perlu dioptimalkan secara efektif agar tidak menjadi pengeluaran operasional yang kurang produktif bagi pengelola bandara maupun instansi pendukung seperti Kantor Wilayah Imigrasi dan Bea Cukai. Melalui upaya ini, diharapkan status internasional bandara dapat memberikan hasil yang optimal, seperti peningkatan frekuensi penerbangan mingguan, tingkat keterisian kursi di atas 70 persen sebagai prasyarat penting bagi keberlangsungan operasional maskapai, serta dominasi penumpang asing minimal 50 persen dapat tercapai secara berkelanjutan.

## Atensi DPR

Pengembalian status internasional pada tiga bandara, yakni Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan Bandara HAS Hanandjoeddin Belitung, memerlukan perhatian dari Komisi V DPR RI. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penetapan status internasional tidak hanya menuntut kesiapan infrastruktur, tetapi juga menyangkut aspek perizinan operasional, ketersediaan layanan keimigrasian, bea cukai, dan karantina, serta efektivitas promosi destinasi. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian Perhubungan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan teknis, serta mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, maskapai, pengelola bandara, dan sektor pariwisata. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI perlu memastikan bahwa implementasi pemenuhan keempat faktor utama sebagai syarat penetapan bandara internasional telah terpenuhi. Selain itu, pengawasan terhadap efisiensi biaya operasional juga penting dilakukan agar status internasional yang diberikan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap peningkatan frekuensi penerbangan, wisatawan asing, dan ekspor-impor daerah.

## Sumber

bisnis.com, 28 April 2025;  
cnbcindonesia.com, 28 April 2025;  
katadata.co.id, 28 April 2025;  
*Kompas*, 29 April 2025;  
kompas.com, 29 & 30 April 2025;  
tempo.co, 29 April 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*